

# Persepsi Masyarakat terhadap Dinasti Politik di Provinsi Banten.

**Annisa Nur Fadilah, Michelle Suparman, Mutiara, Sarah Alya Salsabil**

**Email: [annisa@student.pradita.ac.id](mailto:annisa@student.pradita.ac.id), [michelle.suparman@student.pradita.ac.id](mailto:michelle.suparman@student.pradita.ac.id), [mutiara.2020@student.pradita.ac.id](mailto:mutiara.2020@student.pradita.ac.id), [sarah.alya@student.pradita.ac.id](mailto:sarah.alya@student.pradita.ac.id)**

**ABSTRACT:** Political dynasty is a political power that is run by a group of people who are still related in family relationships. Political dynasties are more synonymous with kingdoms, because the change of power will be carried out primitively or power will be passed down from generation to generation from father to son in a family so that power will remain in the family circle. One of the cases occurred in Banten Province, namely the political dynasty of Ratu Atut Chosiyah. During the 2006 Banten regional elections, Atut ran for governor of Banten paired with M Masduki and won the Banten regional elections. Both served as Governor and Deputy Governor of Banten in 2007-2012. Starting from this position, one by one the members of Atut's extended family entered politics. Beginning with Airin Rachmi Diany, Atut's sister-in-law, in the 2008 Tangerang District Election. The purpose of this study was to determine people's perceptions of dynastic political issues related to Pancasila values in the focus of the scope of Banten Province. This study uses a quantitative method using a Google form which is distributed via social media. The results obtained from the questionnaires that have been distributed show that many people already know about the practice of political dynasties and their effects. Many people think that political dynasties have a negative impact that can harm the implementation of democracy in Indonesia. The government could make clearer and stricter regulations regarding the prohibition of the practice of political dynasties.

**KEYWORDS:** Political Dynasty, Perception, Government, Society, Banten.

**ABSTRAK:** Dinasti politik adalah sebuah kekuasaan politik yang dijalankan oleh sekelompok orang yang masih terkait dalam hubungan keluarga. Dinasti politik lebih identik dengan kerajaan, sebab pergantian kekuasaan akan dilakukan secara primitif atau kekuasaan diwariskan secara turun temurun dari ayah kepada anak dalam satu keluarga agar kekuasaan akan tetap berada di lingkaran keluarga tersebut. Salah satu kasusnya terjadi di Provinsi Banten yaitu dinasti politik Ratu Atut Chosiyah. Saat Pilkada Banten 2006, Atut

mencalonkan diri sebagai gubernur Banten berpasangan dengan M Masduki dan memenangi Pilkada Banten. Keduanya menjabat sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Banten tahun 2007-2012. Berawal dari jabatan tersebut, satu per satu anggota keluarga besar Atut masuk ke politik. Diawali dengan Airin Rachmi Diany, adik ipar Atut, dalam Pilkada Kabupaten Tangerang 2008. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui persepsi masyarakat tentang masalah politik dinasti yang berhubungan dengan nilai-nilai Pancasila dalam fokus ruang lingkup Provinsi Banten. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan menggunakan *Google Form* yang disebarakan melalui media sosial. Hasil yang didapatkan dari kuesioner yang telah disebarakan ternyata sudah banyak masyarakat yang mengetahui tentang praktik dinasti politik dan dampak-dampaknya. Banyak masyarakat yang beranggapan bahwa dinasti politik memiliki dampak buruk yang dapat membahayakan pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Pemerintah bisa membuat peraturan yang lebih jelas dan lebih tegas tentang larangan praktik dinasti politik.

**KATA KUNCI:** Dinasti Politik, Kekuasaan, Pemerintah, Masyarakat, Banten

## I. PENDAHULUAN

Politik merupakan konsep yang sudah diperkenalkan sejak zaman Yunani. Pencetus konsep politik adalah Plato dan Aristoteles. Pada dasarnya kata “*politic*” dalam bahasa Inggris menunjukkan sifat pribadi atau perbuatan. Secara Leksikal, kata tersebut diartikan sebagai: “*Acting and judging wisely, well judged, prudent*” (A.S. Hornby, 1974: 645). Dalam bahasa Latin kata “*politicus*” dan bahasa Yunani “*politicos*” yang artinya “*relating to citizen*”, keduanya ini memiliki kata *poli* yang berarti kota.

Pada dasarnya kekuasaan menurut John R. Schemerhorn merupakan kemampuan untuk mempengaruhi orang lain untuk melakukan sesuatu yang diinginkan, ataupun kemampuan untuk membuat sesuatu yang terjadi pada orang lain menurut keinginan penguasa. Akan tetapi, menurut Niccolo machiavelli, kekejaman asal dipakai secara tepat, merupakan sarana stabilisasi yang diperlukan bagi kekuasaan. Lebih baik jika penguasa ditakuti dibandingkan kalau ia dicintai. Ketakutan bisa mempertahankan persatuan, kemegahan dan martabat penguasa. Manajemen rasa takut ini harus dilaksanakan melalui suatu sentral kekuasaan yang membuat tunduk, patuh dan ketidakberdayaan menjadi landasan untuk tegaknya negara. Negara yang kuat adalah negara yang ditakuti.

Salah satu kekuasaan politik yang dilakukan menyimpang adalah dinasti politik. Dinasti Politik menurut Marcus Mietzner (2009) dalam *paper* yang berjudul *Indonesia’s 2009 Elections: Populisme, Dynasties and the Consolidation of the Party System*, menilai kecenderungan politik dinasti cukup menguat dalam perpolitikan kontemporer Indonesia. Menurutnya, praktik politik dinasti tidak sehat bagi demokrasi, salah satu alasannya adalah karena melemahnya kontrol terhadap pemerintah, seperti *checks and balances* yang diperlukan untuk demokrasi. Dinasti politik dalam dunia politik *modern* dicirikan sebagai elit politik berdasarkan hubungan darah, kekerabatan atau perkawinan, sehingga beberapa pengamat politik menyebutnya sebagai oligarki politik.

Menurut Aristoteles, oligarki merupakan bentuk pemerintahan yang dipegang oleh sekelompok cendekiawan untuk kepentingan kelompoknya. Menurut

Mahfud MD (RoI(8/2/2014): Dari oligarki menghasilkan transaksi, transaksi menghasilkan oligarki, Politik oligarki adalah sistem politik yang membuat pengambilan keputusan-keputusan penting dikuasai oleh sekelompok elit penguasa partai politik, karena jabatan pimpinan partai politik menjadi rebutan banyak pihak. Banyak orang berebut untuk bisa menduduki jabatan pimpinan partai politik dan tidak sedikit yang menggunakan uang untuk meraihnya.

Berdasarkan pandangan Politik dinasti menurut para ahli “istilah dinasti politik menunjuk pada keluarga yang anggotanya memegang kekuasaan politik formal lebih dari satu generasi” (Querubin 2010:2) dan “menyatakan politik dinasti memiliki keunggulan dalam pemilihan umum karena popularitas, talenta, kekayaan dan berbagai hal lain terkait kesuksesan politik yang telah diturunkan antargenerasi” (Querubin 2011). Menurut Martien Herna (2017), Politik Dinasti dan Dinasti Politik merupakan dua hal yang berbeda. Politik Dinasti merupakan sebuah proses regenerasi kekuasaan bagi suatu kepentingan golongan yang meliputi keluarga elit dengan tujuan untuk mendapatkan dan mempertahankan sebuah kekuasaan, sedangkan dinasti politik adalah sistem reproduksi kekuasaan yang dilakukan secara primitif sebab mengandalkan darah keturunan dari beberapa orang.

Dalam konteks Indonesia, kelompok elit adalah kelompok yang memiliki kemampuan untuk mempengaruhi proses pengambilan keputusan politik, sehingga mereka relatif mudah bagi mereka menjangkau kekuasaan atau memperjuangkan perebutan kekuasaan (Mietzner, 2009:20). Kehadiran Dinasti politik di Indonesia menimbulkan kekhawatiran bagi masyarakat karena dapat terjadi ketidaksetaraan dan ketidakadilan dalam distribusi kekuasaan di suatu daerah. Hal ini telah dijelaskan oleh Turner (Bathoro, 2011:118), yaitu sebagai jaringan mempunyai dampak signifikan terhadap dinamika transisi kekuasaan politik dan dapat mempengaruhi penyelesaian rekrutmen politik.

Menurut data yang diambil dari Kompas, kasus korupsi dalam semester pertama tahun 2022, KPK telah melakukan 66 penyelidikan, 60 penyidikan, 71 penuntutan, 59 perkara inkrah, dan mengeksekusi putusan 51 perkara. Membuktikan bahwa penyelewengan kekuasaan yang terjadi mulai dari tingkat

Kabupaten, Kota, dan Provinsi dimana keterlibatan anggota keluarga yang menduduki bangku pemerintahan, sehingga menjadikannya suatu rantai politik. Hal tersebut menandakan bahwa masyarakat masih belum tahu secara jelas apa itu dinasti politik. Dinasti politik yang terjadi di daerah, salah satunya terjadi di Provinsi Banten. Provinsi Banten memiliki 8 kabupaten/ kota. Dari 8 kabupaten/ kota tersebut, setengah wilayahnya 'diduduki' oleh keluarga Ratu Atut Chosiyah, Gubernur Banten yang telah dinonaktifkan di tahun 2013 karena ia ditetapkan sebagai tersangka kasus Sengketa Pilkada Lebak.

Jurnal Penelitian ini dibuat bertujuan untuk mengetahui pandangan masyarakat tentang Dinasti Politik yang berhubungan dengan nilai-nilai Pancasila dalam fokus ruang lingkup Provinsi Banten terhadap kasus Korupsi yang dilakukan oleh mantan Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah. Dari uraian tersebut, dapat diidentifikasi masalah-masalah seperti ketidaksetaraan dan ketidakadilan distribusi kekuasaan, korupsi dan penyelewengan kekuasaan serta banyaknya keterlibatan anggota keluarga dalam menduduki bangku pemerintahan.

Pada umumnya, masa kekuasaan pemerintah seorang ratu atau raja akan memerintah sebagai penguasa satu-satunya agar dapat mengendalikan kesejahteraan dan kedamaian bagi rakyatnya yang disebut dengan pemerintahan Monarki, namun pemerintah tersebut berubah menjadi tirani karena keturunan raja yang bersangkutan sudah tidak memikirkan keinginan masyarakat, sehingga golongan bangsawan melakukan pemberontakan dengan mengambil ahli kekuasaan yang disebut aristokrasi yang cenderung memanipulasi kekuasaan dan menjadi pemerintahan yang mementingkan diri sendiri yang disebut oligarki yang menindas rakyatnya, sehingga rakyatnya memberontak agar pemerintah dapat berganti menjadi demokrasi, namun banyaknya korupsi dimana-mana, sehingga pemerintahan berubah menjadi oklokrasi. Menurut Robert Michels Political Parties (1911), "Kekuasaan oleh *elite* terbatas (oligarki) adalah hukum besi yang tidak terelakkan dalam negara atau organisasi demokrasi sebagai bagian keharusan taktis dan teknis".

## II. METODE

Dalam melakukan kegiatan penelitian tentang pendapat masyarakat terhadap Dinasti Politik dibangku Pemerintahan, serta pengertian dan pengetahuan masyarakat terhadap Dinasti Politik tersebut. Penelitian ini dilakukan di masing-masing tempat responden dengan pengisian kuesioner secara *online* melalui media *Google Form* bertujuan untuk mengetahui serta menampung pendapat masyarakat sekitar.

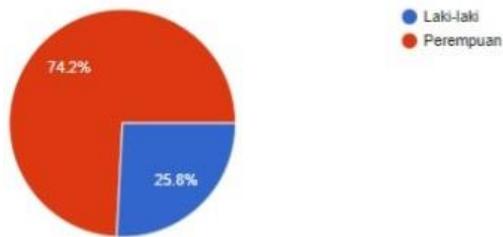
Pengumpulan data yang digunakan merupakan jenis *Cross Section*, yaitu data yang dikumpulkan hanya pada suatu waktu tertentu. Menurut Ariani (2014), *Cross Section* adalah pendekatan yang meneliti korelasi antara faktor-faktor risiko bersifat sementara atau hanya pada satu titik waktu dan tidak dilakukan dalam jangka waktu tertentu. Kuesioner disebar mulai dari tanggal 8 Oktober 2022 sampai dengan 27 Oktober 2022 melalui media sosial. Hasil dari kuesioner yang disebar, terdapat 155 responden yang telah mengisi kuesioner.

Merujuk pada buku Metode Penelitian yang ditulis Andra Tersiana, metode penelitian kuantitatif merupakan jenis penelitian yang menghasilkan sebuah penemuan dengan menggunakan prosedur statistik atau cara lain secara kuantitatif atau terukur. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian survei menggunakan angket (*questionnaire*). Kuesioner adalah teknik pengumpulan data melalui formulir-formulir yang berisi pertanyaan-pertanyaan yang diajukan secara tertulis pada seseorang atau sekumpulan orang untuk mendapatkan jawaban atau tanggapan dan informasi yang diperlukan oleh peneliti (Mardalis: 2008: 66). Kuesioner yang digunakan merupakan kuesioner dengan bentuk tertutup dan tersedia pilihan jawaban untuk dipilih oleh responden. *Google Form* sebagai alat pengumpulan data pada penelitian ini.

### III. HASIL

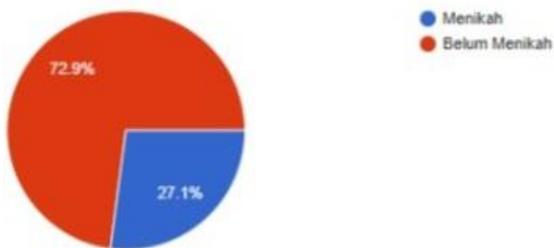
Hasil kuesioner yang didapatkan sebanyak 155 responden. Berikut ini penjelasan lebih rinci dari hasil jawaban di setiap pertanyaan yang diajukan kepada para responden. Pada bagian awal, pertanyaan terkait data pribadi dari responden seperti nama dan umur selanjutnya pertanyaan lain, diantaranya:

#### 1. Jenis Kelamin



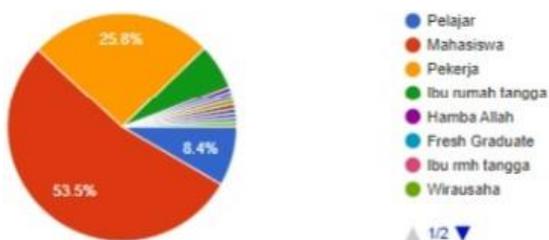
Pertanyaan ini bertujuan untuk menanyakan jenis kelamin dari responden, ternyata responden perempuan jauh lebih banyak dibanding responden laki-laki. Responden perempuan sebanyak 115 orang dan laki-laki sebanyak 40 orang. Responden perempuan sebanyak 115 orang dan laki-laki sebanyak 40 orang.

## 2. Status saat ini



Pertanyaan ini bertujuan untuk bertanya apakah responden sudah menikah atau belum menikah. Respon yang didapatkan sebanyak 113 orang belum menikah dan 42 orang sudah menikah.

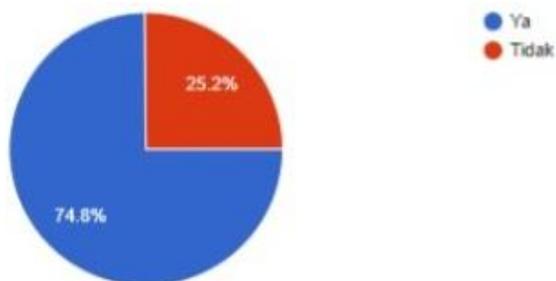
## 3. Pekerjaan



Pertanyaan ini bertujuan untuk menanyakan pekerjaan dari para responden. Jawaban yang didapatkan bermacam-macam dan merangkumnya menjadi empat jawaban besar. Sebanyak 83 orang sebagai mahasiswa, 40 orang sebagai

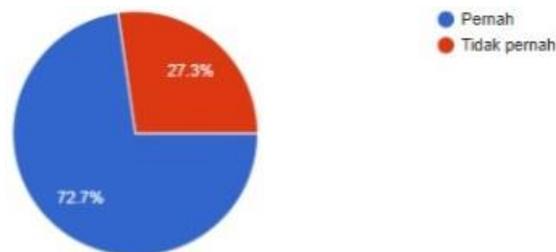
pekerja swasta, 13 orang sebagai pelajar, dan 19 orang lainnya bekerja di luar tiga jawaban di atas.

4. Apakah anda mengetahui tentang Politik Dinasti?



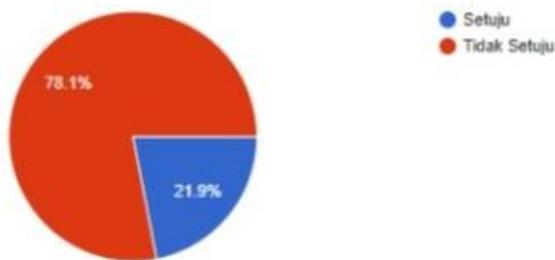
Pertanyaan ini bertujuan untuk mengetahui pengetahuan responden tentang pembahasan dalam kuesioner ini yaitu Politik Dinasti. Sebanyak 116 orang mengetahui apa itu politik dinasti dan ternyata sebanyak 39 orang tidak mengetahui apa itu politik dinasti..

5. Pernahkan mendengar berita tentang kasus politik dinasti sebelumnya?



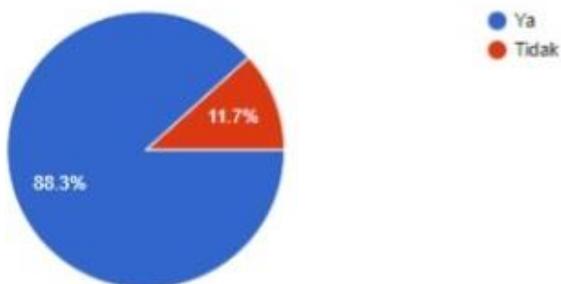
Pertanyaan ini bertujuan untuk mengetahui apakah responden sudah pernah mendengar kasus politik dinasti sebelumnya. Ternyata sebanyak 112 orang responden pernah mendengar dan 42 orang responden belum pernah mendengar.

6. Apakah anda setuju jika sanak keluarga mendapat banyak posisi penting dalam satu wilayah?



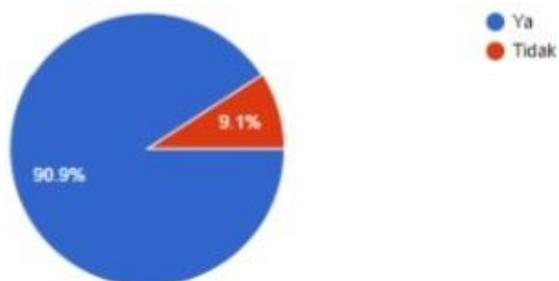
Pertanyaan ini bertujuan untuk mengetahui pendapat responden mengenai tindakan politik dinasti dimana banyak sanak keluarga mendapat banyak posisi penting dalam pemerintahan. Sebanyak 121 orang responden menyatakan tidak setuju bila ada sanak keluarga yang mendapat banyak posisi penting dalam pemerintahan dan 34 orang responden menyatakan setuju.

7. Apakah menurut Anda Politik Dinasti berdampak pada peningkatan kasus KKN?



Pertanyaan ini bertujuan untuk menanyakan kepada responden mengenai apakah praktik politik dinasti berdampak pada peningkatan kasus KKN, sebanyak 137 orang responden berpendapat bahwa praktik politik dinasti dapat meningkatkan kasus KKN dan 18 orang responden menjawab tidak.

8. Apakah Politik Dinasti berbahaya bagi kehidupan berdemokrasi?



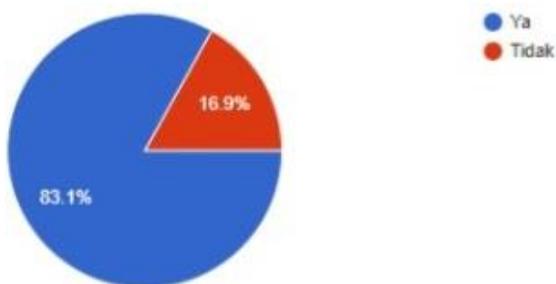
Pertanyaan ini bertujuan untuk mengetahui pendapat responden mengenai politik dinasti terhadap kehidupan berdemokrasi. Sebanyak 141 orang responden menyatakan pendapat bahwa Politik Dinasti berbahaya terhadap kehidupan berdemokrasi dan sebanyak 14 orang responden menjawab tidak.

9. Mengapa Politik Dinasti sering kali menjadi masalah dalam kehidupan berdemokrasi?

Pertanyaan ini merupakan pertanyaan lanjutan dari pertanyaan sebelumnya tentang politik dinasti berdampak pada kehidupan berdemokrasi. Pertanyaan ini bertujuan mengetahui pendapat responden mengenai apa yang menjadi masalah dari politik dinasti dalam kehidupan berdemokrasi, pertanyaan ini merupakan pertanyaan terbuka, sehingga dirangkum menjadi beberapa pernyataan. Pernyataan yang didapatkan diantaranya:

1. Karena jika sanak keluarga memiliki jabatan di pemerintahan, beresiko kebijakan yang dibuat hanya menguntungkan golongan keluarga.
2. Prinsip yang dijalani politik dinasti adalah nilai subjektif bukan nilai objektif.
3. Karena bila dunia politik hanya berisi sanak keluarga tidak ada demokrasi.
4. Terjadi kesenjangan dalam menerapkan konsep Demokrasi.
5. Aspirasi masyarakat tidak didengarkan.

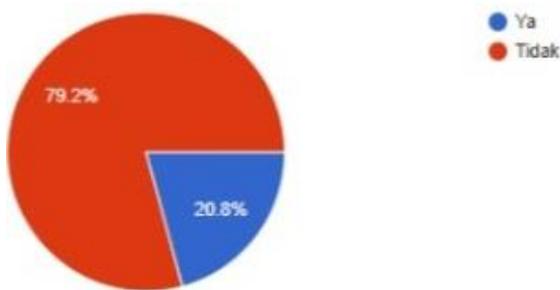
10. Apakah dengan Politik Dinasti seseorang akan dengan cepat mencapai kekuasaan?



Pertanyaan ini bertujuan untuk mengetahui pendapat responden mengenai sanak keluarga dari pemangku kekuasaan yang menjadi lebih mudah memasuki

dunia politik karena praktik dinasti politik. Hasil yang didapatkan ternyata sebanyak 129 orang responden mengatakan bahwa politik dinasti memang membuat sanak keluarga mudah mencapai kekuasaan dan 26 orang responden mengatakan tidak.

11. Apakah menurut Anda Politik Dinasti memiliki dampak positif bagi suatu wilayah/negara?



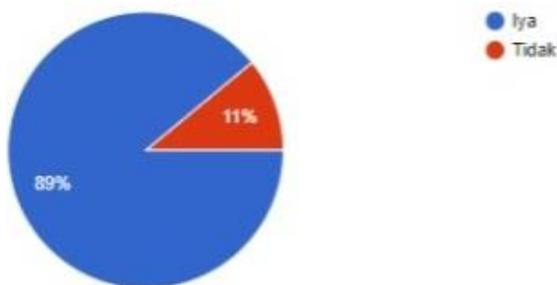
Pertanyaan ini bertujuan untuk mengetahui dampak politik dinasti terhadap suatu wilayah, apakah menurut responden politik dinasti memiliki dampak positif atau tidak. Hasil kuesioner menunjukkan bahwa sebanyak 32 orang responden mengatakan bahwa dinasti politik memiliki dampak positif dan 123 orang mengatakan tidak.

12. Apakah dampak positif Politik Dinasti bagi sebuah wilayah/negara menurut Anda?

Pertanyaan ini bertujuan untuk melanjutkan pertanyaan sebelumnya mengenai dampak positif politik dinasti menurut responden. Hasilnya dirangkum menjadi 4 poin sebagai berikut:

1. Kebijakan lebih sesuai karena mereka sudah mengetahui situasi daerah tersebut dengan lebih baik.
2. Kemudahan untuk melanjutkan kebijakan yang sudah ada sebelumnya.
3. Lebih mudah menyatukan masyarakat yang berbeda-beda golongan.
4. Praktik politik dinasti membawa kemajuan selama masa jabatannya.

13. Menurut Anda perlukah dibuat peraturan yang mengatur tentang Politik Dinasti?



Pertanyaan ini bertujuan untuk mengetahui pendapat responden mengenai pendapat responden tentang perlunya peraturan yang lebih tegas yang mengatur politik dinasti. Hasil kuesioner menunjukkan sebanyak 138 orang responden mengatakan perlunya dibuat peraturan yang mengatur politik dinasti dan sebanyak 17 orang responden mengatakan tidak perlu.

#### 14. Peraturan seperti apa yang perlu dibuat mengenai dinasti politik?



Pertanyaan ini bertujuan menanyakan kepada responden mengenai peraturan apa yang sebaiknya dibuat pemerintah dalam mengatur praktik Politik Dinasti. Hasil kuesioner menunjukkan sebanyak 87 orang memilih untuk dibuat peraturan yang mengatur batasan sanak keluarga dalam menduduki posisi penting di pemerintahan, sebanyak 40 orang memilih untuk dibuat peraturan tentang lamanya masa jabatan pada satu periode yang sama. Selain dua jawaban diatas terdapat banyak respon seperti peraturan tentang pendidikan minimal, kualitas dari calon, dan pengalaman di bidang politik sebelumnya.

## IV. PEMBAHASAN

Dari hasil kuesioner yang disebarkan kepada para responden terdapat, sebanyak 155 responden. Responden bermayoritas perempuan dan sebagian besar dari responden berstatus mahasiswa. Hampir seluruh responden pernah mendengar dan mengetahui dinasti politik. Responden mengatakan bahwa praktik politik

dinasti memiliki dampak negatif yang dapat mempengaruhi kehidupan demokrasi di Indonesia. Praktik dinasti politik rawan terjadi pada kasus korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), namun selain dampak negatif, beberapa responden juga memberikan tanggapan mereka tentang dampak positif dari politik dinasti. Hasil dari responden tentang salah satu pertanyaan perlukah pemerintah membuat peraturan yang lebih jelas dan lebih tegas untuk mengatur praktik politik dinasti di Indonesia. Respon yang didapatkan dari para responden adalah bertujuan agar masyarakat dapat menyuarakan suaranya terhadap pemerintah yang dapat berperan penting sebagai perwakilan rakyat dan dapat membuat atau mengesahkan undang-undang untuk lebih tegas memberantas praktik politik dinasti yang banyak menimbulkan dampak buruk dalam kehidupan berdemokrasi.

Berdasarkan pengalaman peneliti, ada beberapa keterbatasan yang dialami selama proses penelitian dan beberapa faktor yang kedepannya dapat diperhatikan kembali oleh peneliti yang ingin menyempurnakan penelitiannya karena penelitian ini masih memiliki kekurangan yang harus diperbaiki. Beberapa keterbatasan dalam penelitian tersebut sebagai berikut:

1. Jumlah responden mempunyai jumlah sebanyak 155 orang, tentunya masih jauh dari kondisi yang dapat menggambarkan keadaan secara langsung.
2. Objek penelitian ini ditujukan melewati kuesioner Google Form yang dimana seharusnya bisa menjangkau lebih luas lagi melewati social media ataupun melakukan interview kepada lingkungan sekitar tentang dinasti politik.
3. Pada proses pengambilan data, informasi yang diperoleh responden melalui kuesioner tidak menunjukkan pendapat responden yang semestinya, karena adanya perbedaan pandangan, pengetahuan, dan pemahaman yang berbeda tiap responden, seperti aspek kejujuran dalam pengisian pendapat responden dalam kuesionernya.

## **VI. KESIMPULAN**

Berdasarkan dari riset atau penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa sebagian besar masyarakat belum mengetahui secara keseluruhan tentang apa itu Dinasti Politik yang sesungguhnya serta pendapat mereka terhadap ketidaksetujuan adanya praktik Dinasti Politik dibangku pemerintahan karena dapat menyebabkan ketidakadilan dan ketidaksetaraan pembagian kekuasaan pada suatu daerah.

Alasan mereka menolak adanya praktik ini adalah kebijakan yang nantinya dibuat pastinya akan lebih menguntungkan sisi mereka dan dinilai tidak akan lagi mendengar aspirasi masyarakat, terutama masyarakat golongan menengah kebawah. Kemudian, prinsip yang dilaksanakan dalam menjalankan dinasti politik bersifat subjektif bukan lagi objektif. Pada akhirnya, apabila sistem dinasti politik berkuasa, maka tidak ada lagi konsep demokrasi di Indonesia. Alasan tersebut mengacu pada pertanyaan mengenai dinasti politik yang menjadi masalah dalam kehidupan demokrasi.

Masyarakat mengharapkan pemerintah membuat peraturan yang bisa mengatur praktik dinasti politik agar pembagian kekuasaan dapat menyebar secara merata, tetapi masyarakat juga seringkali tidak menyadari bahwa praktik tersebut sudah banyak terjadi dan terus dilanjutkan secara turun-temurun dalam ruang lingkup aktivitas mereka, sehingga pemerintah harus lebih tegas dalam mengatur adanya praktik politik dinasti.

## **UCAPAN TERIMAKASIH**

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, dengan rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan jurnal yang berjudul “Persepsi Masyarakat terhadap Dinasti Politik di Provinsi Banten”. Shalawat serta salam selalu penulis limpahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW. Penulis menyadari bahwa jurnal ini tidak dapat terselesaikan tanpa adanya doa dan dukungan dari berbagai pihak. Sehubungan dengan itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Mohammad Alvi Pratama, M. Phil, selaku dosen Program Studi Manajemen Bisnis pada Mata Kuliah Kewarganegaraan yang telah memberikan arahan dan bimbingan dalam proses penyusunan jurnal ini.
2. Annisa Nur Fadilah, Michelle Suparman, Mutiara, dan Sarah Alya Salsabil selaku penulis jurnal yang telah berjuang bersama dalam menyelesaikan jurnal ini.
3. Teman-teman seperjuangan Program Studi Manajemen Bisnis 2020.
4. Seluruh pihak yang turut serta membantu dalam proses penyusunan jurnal ini.

## DAFTAR REFERENSI

- Abdulkadir B. Nambo dan Muhamad Rusdiyanto Puluhuluwa (2005). MEMAHAMI TENTANG BEBERAPA KONSEP POLITIK (Suatu Telaah dari Sistem Politik).
- Arisandi, R. S. (2016). KORUPSI POLITIK DAERAH: Studi Jejaring Politik, Politik Nepotisme dan Perlawanan Rakyat dalam Pemilihan Kepala Daerah (Doctoral dissertation, Universitas Airlangga).
- Bathoro, A. (2011). Perangkap dinasti politik dalam konsolidasi demokrasi. *Jurnal Fisip Umrah*, 2(2), 115-125.
- Budiyono, B. (2016). Politik Dinasti dalam Pemberitaan Media: Analisis Framing Isu Politik Dinasti Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah Pada Harian Kompas dan Koran Tempo. *Jurnal IPTEK-KOM*, 18(2), 160-173.
- Darmansyah, R., Syahrani, S. D., & Harirah, Z. (2020). Potret Dinasti Politik dalam Pengisian Jabatan Administratif. *Journal of Political Issues*, 2(1), 34-46.
- IDA AYU, P. S. W. (2019). HUBUNGAN STATUS KEKURANGAN ENERGI KRONIS DENGAN KEJADIAN ANEMIA PADA IBU HAMIL DI PUSKESMAS I DENPASAR SELATAN TAHUN 2017-2019 (Doctoral dissertation, Poltekkes Denpasar).
- Ii, B. A. B., Care, A. A., & Care, P. A. (2005). Bab ii tinjauan pustaka a. Published online, 7-40.
- Ika Lestari (2019), Pengertian Pemerintahan Oligarki dan Ciri-cirinya.
- Intan Rachmina Koho, S.IP., M.Si (2021), OLIGARKI DALAM DEMOKRASI INDONESIA.
- Issha Harruma (2022), Data Kasus Korupsi di Indonesia Tahun 2022.
- Koho, I. R. (2021). Oligarki Dalam Demokrasi Indonesia. *Lensa*, 15(1), 60-73.

- Mandey, A. F. (2018). PERBEDAAN AKUNTABILITAS KEUANGAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH ANTARA DAERAH TERINDIKASI POLITIK DINASTI DAN TIDAK TERINDIKASI POLITIK DINASTI (Doctoral dissertation, UAJY).
- Mietzner, M. (2009). Indonesia's 2009 elections: populism, dynasties and the consolidation of the party system.
- Mukhtar (2018). PENGUASA DAN KEKUASAAN DALAM PANDANGAN KOMUNIKASI POLITIK MACHIAVELL.
- Susanti, M. H. (2017). Dinasti Politik dalam Pilkada di Indonesia. *Journal of Government and Civil Society*, 1(2), 111-119.
- Tanjung, A. (2021). Pandangan Fiqh Siyasah terhadap politik Bobby Nasution dalam pencalonan Walikota Medan Tahun 2020-2025 (Studi Kasus sKota Medan) (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara).
- Tristana, R. W., & Priyatno, H. (2017). Dinasti Politik Dalam Pemerintahan Desa di Desa Kancilan Kecamatan Kembang Kabupaten Jepara Periode 1989-2017 (Analisis Implikasi Sosial dan Politik). *Journal of Politic and Government Studies*, 6(03), 121-130.
- UMAM, F. N. (2020). POLITIK DINASTI KEPALA DESA (Studi Se-abad Keluarga Raden Saleh Berkuasa Mulai 1879-1988 Di Desa Tawangbanteng Kabupaten Tasikmalaya) (Doctoral dissertation, Universitas Siliwangi).